



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
KE DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN
RI, DEPUTI KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEMENTERIAN BUMN RI, PT
KAI, PT WIJAYA KARYA, DAN PT HUTAMA KARYA
BANDUNG, JAWA BARAT
TANGGAL 13 – 15 JUNI 2023**

I. PENDAHULUAN

Definisi secara umum penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 disebutkan bahwa Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan sebagai modal Perusahaan Negara dan/ atau Perseroan Terbatas lainnya serta Lembaga/Badan Lainnya, yang pengelolaannya dilakukan secara korporasi. Hal tersebut juga dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.06/2022 tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyertaan modal negara pada perusahaan negara. Lebih lanjut, Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Adapun bentuk-bentuk PMN adalah Tunai, yakni Pemerintah memberikan sejumlah uang kepada BUMN; Konversi piutang Pemerintah yaitu Pemerintah mengkonversi utang BUMN kepada Pemerintah menjadi PMN; dan Hibah saham/aset dari pihak lain. Lebih lanjut, maksud dan tujuan penambahan PMN kepada BUMN tercantum dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-1/MBU/03/201 tentang

Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Dari sisi anggaran, pada tahun 2022 Kementerian BUMN mengusulkan PMN kepada 12 BUMN dengan total Rp 72,4 triliun. Secara umum total investasi pemerintah dalam bentuk PMN pada periode 2005-2021 kepada BUMN sebesar Rp 361,3 triliun dan kepada BLU sebesar Rp334,3 triliun atau total keseluruhan sebesar Rp 695,6 triliun. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 disebutkan realisasi pembiayaan PMN/Investasi pemerintah sebesar Rp 113,46 triliun atau 72,99% dari anggaran Rp 155,46 triliun. PMN ini antara lain terdiri atas PMN untuk BUMN, PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional, PMN dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan PMN/Investasi lainnya.

Berdasarkan Undang-undang APBN/APBN-P selama periode Tahun 2015-2018 diketahui terdapat 71 transaksi penyaluran PMN kepada 50 BUMN (4 berada di lingkungan Kementerian Keuangan dan 46 berada di lingkungan Kementerian BUMN). PMN diberikan dalam bentuk tunai maupun non tunai dengan total anggaran sebesar Rp125,40 triliun, yaitu tahun 2015 sebesar Rp64,88 triliun, tahun 2016 sebesar Rp50,53 triliun, tahun 2017 sebesar Rp6,37 triliun, dan tahun 2018 sebesar Rp3,60 triliun.

Lebih lanjut secara detail, Alokasi APBN pada lima program prioritas nasional yang dibiayai dana penyertaan modal negara (PMN) tunai tahun 2015-2018 senilai Rp88,58 triliun sebanyak 41 BUMN (termasuk 5 anak perusahaan) dan realisasi penyaluran dana sebesar Rp88,57 triliun dan telah digunakan sebesar Rp79,4 triliun, terdapat sisa dana sebesar Rp8,93 triliun per 30 September 2019. Adapun lima program prioritas nasional tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas sebesar Rp62,41 triliun, antara lain ditujukan untuk pengembangan bandara, penyelesaian jalan tol strategis dan pembangunan jalan tol trans Sumatera, kawasan ekonomi khusus, proyek pembangkit listrik 35 GW, Infrastruktur LRT Jabodetabek.
2. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Kedaulatan Pangan sebesar Rp10,67 triliun ditujukan antara lain untuk mendukung program swasembada pangan, pengadaan benih, peningkatan produksi gula dan garam, serta peningkatan produksi ikan nasional.
3. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Pembangunan Maritim sebesar Rp 5,15 triliun, antara lain ditujukan untuk pengembangan kepelabuhan di Indonesia timur, penyediaan kapal penumpang dan kapal barang, perbaikan dan pengembangan terminal ferry, serta pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan kapal.

4. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Industri Pertahanan dan Keamanan, sebesar Rp 2,60 triliun antara lain ditujukan untuk peningkatan kapasitas produksi, modernisasi fasilitas produksi, mengantisipasi berkembangnya pasar, dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia.
5. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Kemandirian Ekonomi Nasional sebesar Rp 4,25 triliun, antara lain ditujukan untuk pembiayaan, penjaminan kredit usaha rakyat dan pendampingan UMKM.

Dari sisi audit/pemeriksaan, berdasarkan IHPS I Tahun 2022, BPK RI melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pengelolaan Program yang Dibiayai Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun 2015 s.d. 2018 pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMN Penerima PMN di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara (LHP: 22 April 2021). Dari LHP tersebut terdapat **70 temuan** senilai Rp383,97 miliar dan USD 11.88 juta dengan **107 permasalahan** dan 113 rekomendasi. Lebih detail lagi, permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebesar Rp166,48 miliar, potensi kerugian sebesar Rp30,18 miliar serta kekurangan penerimaan sebesar Rp86,49 miliar dan USD 11.88 juta.

Selain itu, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Pengelolaan Penyertaan Modal Negara di BUMN tahun 2020 S.d. Semester I tahun 2022 pada Kementerian BUMN dan Instansi Terkait di Jakarta (LHP Nomor 8/AUDITAMA VII/PDPTT/02/2023, tanggal 21 Februari 2023) terdapat **10 temuan**, yaitu sebagai berikut.

1. Hasil Pekerjaan atas Dana PMN Tahun 2015 dan 2016 Sebesar Rp10,49 Triliun pada 13 BUMN Belum Dapat Dimanfaatkan
2. Dana Perubahan Tambahan PMN Sebesar Rp387,62 Miliar Belum dapat Dimanfaatkan
3. Sisa Dana dan Potensi Sisa Dana Tambahan PMN Sebesar Rp215,25 Miliar Belum Jelas Pemanfaatannya
4. BUMN Menanggung Beban Bunga Pinjaman Minimal Sebesar Rp101 Miliar atas Lambatnya Proses Pencairan Tambahan PMN
5. BUMN Menanggung Beban Bunga Pinjaman Minimal Sebesar Rp3,38 Triliun atas Penugasan yang Tidak Didukung dengan Prioritas Alokasi PMN
6. Kementerian BUMN Kurang Optimal dalam Melakukan Verifikasi atas Kajian Usulan PMN dari BUMN
7. Kajian Bersama atas Pengajuan Usulan Tambahan PMN Tidak Menunjukkan Keterlibatan Kementerian Teknis

8. Evaluasi Pelaporan atas Penggunaan Tambahan PMN oleh Kementerian BUMN Belum Dilakukan Secara Optimal
9. Kementerian BUMN Belum Optimal dalam Melakukan Pemantauan atas Penerapan Key Performance Indicator (KPI) PMN
10. 31 BUMN Belum Memenuhi Target P3DN serta Enam BUMN Belum Memiliki Tim P3DN dan Roadmap TKDN.

Berdasarkan uraian pada bagian ini, BAKN DPR RI perlu meminta masukan dan melakukan pendalaman materi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN RI, PT KAI, PT Wijaya Kara, dan PT Utama Karya terkait dengan kebijakan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN dan Badan Lainnya. Dengan masukan dan pendalaman tersebut diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan.

II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA LAPANGAN

A. Agenda Kegiatan

Kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN RI, PT KAI, PT Wijaya Kara, dan PT Utama Karya dimaksudkan untuk mendapatkan masukan terkait kebijakan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN dan Badan Lainnya, serta mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan sebagai bahan penelaahan BAKN DPR RI.

Kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN RI, PT KAI, PT Wijaya Kara, dan PT Utama Karya dilaksanakan pada tanggal 13 – 15 Juni 2023.

B. Susunan Keanggotaan Tim

NO	NO. ANGG.	N A M A	KETERANGAN
1.	A-533	H.WAHYU SANJAYA,S.E.	KETUA BAKN DPR RI/F. PD
2.	A-201	Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO	WAKIL KETUA BAKN DPR RI/ F. PDIP
3.	A-423	Dr. Hj. ANIS BYARWATI	WAKIL KETUA BAKN DPR RI /F. PKS
4.	A-314	H.MUKHAMAD MISBAKHUN,S.E.,M.H.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-GOLKAR
5.	A-83	Ir. IRWAN ARDI HASMAN	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.GERINDRA
6.	A-367	SAAN MUSTOPA, M.Si.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.NASDEM
7.	A-26	H.BACHRUDIN NASORI,S.Si.,M.M.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.PKB
8.	A-495	AHMAD NAJIB QODRATULLAH,S.E.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-PAN
9.	A-476	Dr. H.M. AMIR USKARA, M.KES	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-PPP
SEKRETARIAT TIM KUNKER			
10.	--	DWIAN PUJASWATI, S.E.	KASUBBAG TU SET. BAKN
11.	--	SENO WIBISUKMANA, S.KOM	STAF SET. BAKN
12.	--	MAFTUCHAH	STAF SET. BAKN
13.	--	NURUL ISTIQLAL, A.Md.	STAF SET. BAKN
14.	--	LUSIANA PUTRI AHMADI, M.Ak.	TENAGA AHLI
15.	--	MITA WAHYUNINGSIH, M.M.	TENAGA AHLI
16.	--	LARISSA AMANDA INDIANTI SIAHAAN, S.I.P.	MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL
17.	--	HILMAN HIDAYAT	TVR PARLEMEN
18.	--	MARJOKO	KENDARAAN

C. Kegiatan Yang Dilakukan

Pertemuan dihadiri oleh:

1. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI
2. Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN RI
3. PT KAI
4. PT Wijaya Karya
5. PT Hutama Karya

Pada pertemuan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN RI, PT KAI, PT Wijaya Kara, dan PT Hutama Karya, BAKN DPR RI mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan kebijakan pemberian PMN kepada BUMN dan Badan Lainnya serta permasalahan terkait PMN sebagai berikut.

1. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI

- a. Usulan PMN dilakukan penilaian oleh DJKN selaku Pembantu Pengguna Anggaran BUN berdasarkan PMK Nomor 218/PMK.06/2020. Aspek yang dilakukan penilaian adalah aspek urgensi, aspek ekonomi, aspek keuangan, aspek legal, aspek fiscal, aspek lingkungan, dan aspek sosial.
- b. Penyusunan kajian, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi PMN dilaksanakan berdasarkan PMK Nomor 146/PMK.06/2020. BUMN/Lembaga menyusun laporan realisasi penggunaan PMN dilampiri dengan Kontrak Kinerja Manajemen dan dilakukan reuiu oleh SPI. Dalam hal terdapat penggunaan PMN yang tidak sesuai peruntukan atau permasalahan signifikan lain, hasilnya disampaikan kepada Menteri BUMN. Lebih lanjut, target Kinerja PMN dilakukan melalui Letter of Commitment (LoC) antara DJKN, KBUMN, dan Direksi. LoC ini kemudian dituangkan dalam Kontrak Kinerja Perseroan selama 5 tahun. Target terdiri atas indikator output dan outcome yang terkait dengan penggunaan dan manfaat dari dana PMN.
- c. Pengawasan terhadap PMN dilakukan melalui proses audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Beberapa BUMN yang sudah dilakukan pengawasan adalah PT BPUI, PT Adhi Karya, PT SMF, PT ITDC, PT Waskita Karya, PT KAI, dan PT Hutama Karya.
- d. Tindak lanjut temuan PT KAI, PT HK, dan WIKA yaitu dengan menerapkan beberapa PMK dan perbaikan tata Kelola

2. Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN RI

- a. Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/03/2023, Direksi BUMN diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan tambahan PMN kepada RUPS/Menteri/Pemegang Saham Negara secara triwulanan dan tahunan sampai dengan tambahan PMN seluruhnya selesai digunakan.
- b. Atas tambahan penggunaan tambahan PMN, Menteri BUMN melakukan pemantauan penggunaan tambahan PMN yang dilaksanakan secara triwulan atau sewaktu-waktu atas laporan realisasi penggunaan tambahan PMN yang disampaikan oleh Direksi. Pemantauan penggunaan tambahan PMN ini selanjutnya didelegasikan kepada Wakil Menteri sesuai

dengan portofolionya masing-masing. Dalam melaksanakan pemantauan atas penggunaan tambahan PMN, Wakil Menteri dapat melakukan peninjauan lapangan.

- c. Berdasarkan hasil pemantauan, Wakil Menteri menyampaikan surat tertulis kepada BUMN atau PT mengenai langkah yang perlu dilakukan BUMN atau Perseroan Terbatas penerima PMN dengan tembusan kepada Menteri BUMN.
- d. Dalam rangka memenuhi ketentuan dan penyelesaian proyek tambahan PMN, diatur mengenai KPI PMN untuk BUMN penerima BUMN dengan memperhatikan peruntukan tambahan PMN yang diberikan kepada masing-masing BUMN. Sesuai dengan Aspirasi Pemegang Saham, KPI PMN tersebut dimasukkan ke dalam Kontrak Manajemen Direksi.
- e. Dalam hal terdapat usulan PMN dari BUMN, Kedepujian Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko berperan dalam melakukan evaluasi atas usulan tambahan PMN kepada BUMN. Evaluasi ini dilakukan bersama unit terkait. Hasil Evaluasi selanjutnya dapat memberikan pertimbangan bagi Menteri BUMN dalam menyetujui usulan tambahan PMN kepada BUMN di bawah pembinaan Kementerian BUMN.
- f. Evaluasi yang dilakukan adalah menilai kelengkapan administrasi usulan PMN serta kelayakan usulan PMN.
- g. Dalam menilai kelayakan usulan PMN, terdapat aspek-aspek yang harus dievaluasi pada dokumen kajian awal usulan tambahan PMN seperti aspek urgensi, aspek ekonomi, aspek keuangan, aspek nominal usulan tambahan PMN, Aspek legal, aspek operasional, dan aspek manajemen risiko
- h. Dari Evaluasi kelayakan usulan tambahan PMN, selanjutnya usulan tambahan PMN pada BUMN dapat direkomendasikan/tidak direkomendasikan.

3. PT KAI

- i. Kinerja Pendapatan dan Laba (Rugi) yaitu terjadi Penurunan pendapatan penumpang sebesar 70% atau ekuivalen sebesar Rp 6,8 triliun ditahun 2020 akibat dampak pandemi Covid19 berdampak pada penurunan kinerja profitabilitas KAI dimana ditahun 2020 mencatatkan rugi bersih sebesar Rp 1,7 triliun. Kinerja angkutan penumpang yang telah menunjukkan recovery dan kinerja angkutan barang yang stabil di tahun 2022 berdampak positif pada kinerja profitabilitas KAI, dimana s.d. 31 Des 2022 (audited) KAI telah membukukan profit sebesar Rp 1,6 triliun.
- j. Kinerja Aset dan Liabilitas yaitu Total Aset dan Total Debt dari tahun 2020 s.d. tahun 2022 mengalami peningkatan sejalan dengan penugasan yang diterima KAI dalam beberapa tahun

terakhir, seperti LRT Jabodebek, KA Bandara Soetta, dan Proyek KCJB, disamping pertumbuhan organik khususnya pengembangan angkutan batubara di Sumbagsel. Selain itu, Tambahan PMN sebesar Rp 6,9 triliun yang diterima oleh KAI pada 31 Desember 2021 untuk memenuhi base equity Proyek KCJB dan cost overrun Proyek LRT Jabodebek serta Tambahan PMN Rp 3,2 triliun pada tahun 2022 untuk pemenuhan cost overrun proyek KCJB, berkontribusi pada penambahan ekuitas KAI dan penurunan rasio Debt-to-Equity Ratio (DER) di tahun 2021 menjadi 1,2x dan di tahun 2022 menjadi 1,0x dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 1,5x.

- k. Kinerja angkutan penumpang dan barang triwulan 1 2019 – 2023 yaitu Kinerja angkutan penumpang mulai mengalami penurunan pada Triwulan I tahun 2020 dikarenakan adanya dampak Pandemi Covid-19 yang mulai muncul di Indonesia pada Maret 2020. Kinerja angkutan penumpang ini mulai berangsur pulih pada tahun 2022 dimana pada Triwulan I volume meningkat 34% dan pendapatan meningkat 128% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya dan kembali meningkat sebesar 69% untuk volume penumpang dan 100% untuk Pendapatan pada Triwulan I tahun 2023. Lebih lanjut, Kinerja angkutan barang tidak terlalu terdampak dengan adanya pandemi dan terus mengalami pertumbuhan sampai dengan Triwulan I tahun 2023.
- l. Total PMN Rp7,6 Triliun telah sepenuhnya terserap dan telah dilaporkan secara final pada Laporan Final Realisasi Penggunaan Tambahan Dana PMN tahun anggaran 2015, 2016, dan 2018 perusahaan PT KAI pada tanggal 27 Oktober 2020.
- m. Realisasi penggunaan dana PMN TA 2021 sampai dengan 31 Mei 2023 adalah sebesar Rp680 Miliar. Untuk pemenuhan biaya praoperasi Divisi LRT Jabodebek yang terdiri dari biaya pegawai dan non pegawai (Praoperasi) sebesar Rp139 Miliar, fasilitas depo & balai yasa sebesar Rp4,9M, jasa konsultan sebesar Rp44 Miliar dan IDC & Financing Fees sebesar Rp491 Miliar. Kemudian sisanya akan diproyeksikan ke Juni s.d. TW IV 2023.
- n. PMN TA 2021 untuk proyek KCJB adalah sebesar Rp 4,3 triliun untuk memenuhi kebutuhan base equity telah diterima KAI pada 31 Des 2021, dan pada hari yang sama telah dilakukan setoran ke PSBI dan dari PSBI ke KCIC. Sampai dengan 31 Mei 2023, PMN 2021 untuk Proyek KCJB Rp 4,3 Triliun sudah terserap adalah sebesar 90%. Dana PMN belum terserap 100% dikarenakan belum terealisasinya Pembayaran untuk GSM-R atas Penyediaan Frekuensi dengan Telkomsel.
- o. Total nilai PMN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3,2 Triliun akan digunakan sebagai tambahan setoran modal kepada PT PSBI (porsi equity Konsorsium BUMN Indonesia)

sebagai pemenuhan cost overrun proyek KCJB pada PT KCIC. Pada tanggal 10 Maret 2023, PT KAI telah melakukan penyetoran tahap I kepada PT PSBI sebesar Rp2.030.804.000.000,- (dua triliun tiga puluh miliar delapan ratus empat juta rupiah) yang bersumber dari PMN TA 2022. Dana tersebut masih belum digunakan oleh PT KCIC sebelum ada setoran dari pihak Beijing Yawan (Porsi Konsorsium Cina)

- p. Pengaruh penerimaan PMN terhadap kinerja perusahaan yaitu Proyeksi kinerja KAI tanpa penerimaan PMN dan diasumsikan melakukan pinjaman sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan perusahaan, terutama di tahun 2020 dan 2021 DER mencapai 3,5 s.d. 4,7 kali melampaui toleransi maksimum 3 kali. Tanpa penerimaan PMN, maka akan terdapat tambahan pinjaman untuk menyelesaikan penugasan proyek strategis nasional. Dengan adanya penerimaan PMN total sebesar Rp10,2 Triliun ini, akan memperkuat struktur modal PT KAI dimana rasio DER rata-rata 1x s.d. 1,2x. Tambahan Debt Service - Dengan adanya penerimaan PMN, beban bunga PT KAI relatif lebih rendah kisaran 700 Milyar s.d 900 Milyar pertahun, sedangkan apabila PT KAI tidak menerima PMN akan ada tambahan pendanaan eksternal dengan tingkat bunga pasti lebih tinggi sekitar 8% dengan beban bunga sekitar 1 Triliun s.d 1,7 triliun per tahun. Hal tersebut akan berdampak pada kinerja profitabilitas PT KAI.
- q. Empat dari lima temuan PMN pada PT KAI telah ditindaklanjuti dan sementara menunggu hasil validasi antara tim BPK RI dengan Inspektorat Kementerian BUMN.

4. PT Wijaya Karya

- a. Parameter dan Indikator Penentuan WIKA Dalam Menentukan Program Kerja Terkait Penggunaan Dana PMN :
- 1) Proyek yang masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional.
 - 2) Proyek yang mendorong pembukaan lapangan kerja secara masif baik pada masa konstruksi maupun setelahnya.
 - 3) Proyek yang dapat mendorong multiplier effect seperti menumbuhkan sentra ekonomi industri khususnya industri mikro dan menengah .
 - 4) Proyek yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas serta peningkatan kualitas hidup yang lebih baik seperti :
 - Pembangunan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda dapat mempersingkat waktu tempuh dari Balikpapan ke Samarinda dari 3 jam menjadi 1,5 jam;
 - Pembangunan Jalan Tol Serang – Panimbang dapat mempersingkat waktu tempuh Jakarta ke Tanjung Lesung dari 5 jam menjadi 3 jam; dan
 - pembangunan Proyek SPAM Jatiluhur dapat men-supply kebutuhan air di Jakarta, Bekasi dan Karawang.
 - 5) Proyek yang memberikan imbal hasil yang baik bagi perseroan sehingga meningkatkan dividen payout dan kontribusi pajak.

- b. Dampak sosial dan besarnya manfaat yang diterima masyarakat atas PMN yang diterima PT Wika antara lain:
- 1) menunjang PON XIX Jawa Barat 2016, mengurangi kemacetan, menunjang akses lokasi wisata Bandugn Selatan (Jalan Tol Sorean-Pasir Koja);
 - 2) meningkatkan aksesibilitas di Sulawesi Utara, meratakan pertumbuhan ekonomi di Timur Indonesia (Jalan tol Manado Bitung);
 - 3) mendukung distribusi CPO, meningkatkan perekonomian dan sarana penghubung Kawasan di Kalimantan Timur (Jalan Tol Balikpapan-Samarinda).
 - 4) Meningkatkan konektivitas Provinsi Banten, menumbuhkan ekonomi di Banten Selatan, mempermudah akses wisata ke Tanjung Lesung (Jalan Tol Serang-Panimbang);
 - 5) Meningkatkan layanan air minum di DKI Jakarta, Bekasi, dan Karawang, meningkatkan Kesehatan penduduk dan mengurangi penggunaan air tanah (SPAM Jatiluhur);
 - 6) Mempersingkat waktu tempuh ke Bandara Soekarno Hatta, memperlancar arus distribusi barang dan jasa di Jakarata dan Tangerang (Jalan Tol Kunciran-Cengkareng).
- c. Dari 10 temuan terkait PMN pada PT Wika, 8 diantaranya telah ditindaklanjuti dan telah diterima BPK RI, sementara 2 diantaranya telah ditindaklanjuti dan masih dalam proses validasi BPK RI.

5. PT Utama Karya

- a. Kontribusi setoran pajak PT HK kepada penerimaan negara mengalami peningkatan sejak tahun 2018 – 2021. Kemudian menurun di tahun 2022. Sedangkan, dividen kepada penerimaan negara, mengalami peningkatan tahun 2018-2019. Dan dikarenakan kinerja keuangan PT HK pada tahun 2020 – 2022 mengalami kerugian, maka tidak ada dividen yang dibagikan ke negara.
- b. Dampak sosial ekonomi PMN yang diterima oleh PT HK khususnya yang digunakan untuk jalan tol trans sumatera adalah dengan tersambungny akses jalan Tol Trans Sumatera membuahkan hasil berupa jarak yang lebih pendek, percepatan waktu tempuh, serta pengurangan biaya BBM.
- c. Dari 4 temuan PMN pada PT HK, semuanya telah ditindaklanjuti dengan status telah sesuai rekomendasi.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN DAN SARAN

Kesimpulan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN RI, PT KAI, PT Wijaya Kara, dan PT Hutama Karya sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap PMN dilakukan melalui proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Beberapa BUMN yang sudah dilakukan pengawasan adalah PT BPUI, PT Adhi Karya, PT SMF, PT ITDC, PT Waskita Karya, PT KAI, dan PT Hutama Karya. Pada beberapa BUMN yang bermasalah, seperti PT KAI, PT HK, dan PT Wika, Tindak lanjut temuan dilakukan dengan menerapkan beberapa PMK dan perbaikan tata Kelola.
2. Dalam hal terdapat usulan PMN dari BUMN, Kedeputian Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko berperan dalam melakukan evaluasi atas usulan tambahan PMN kepada BUMN. Evaluasi ini dilakukan bersama unit terkait. Hasil Evaluasi selanjutnya dapat memberikan pertimbangan bagi Menteri BUMN dalam menyetujui usulan tambahan PMN kepada BUMN di bawah pembinaan Kementerian BUMN. Evaluasi yang dilakukan adalah menilai kelengkapan administrasi usulan PMN serta kelayakan usulan PMN. Lebih lanjut, dalam menilai kelayakan usulan PMN, terdapat aspek-aspek yang harus dievaluasi pada dokumen kajian awal usulan tambahan PMN seperti aspek urgensi, aspek ekonomi, aspek keuangan, aspek nominal usulan tambahan PMN, Aspek legal, aspek operasional, dan aspek manajemen risiko. Dari Evaluasi kelayakan usulan tambahan PMN, selanjutnya usulan tambahan PMN pada BUMN dapat direkomendasikan/tidak direkomendasikan.
3. Total PMN Rp7,6 Triliun yang diterima oleh PT KAI telah sepenuhnya terserap dan telah dilaporkan secara final pada Laporan Final Realisasi Penggunaan Tambahan Dana PMN tahun anggaran 2015, 2016, dan 2018 perusahaan PT KAI pada tanggal 27 Oktober 2020. Lebih lanjut, realisasi penggunaan dana PMN TA 2021 sampai dengan 31 Mei 2023 adalah sebesar Rp680 Miliar. Untuk pemenuhan biaya praoperasi Divisi LRT Jabodebek yang terdiri dari biaya pegawai dan non pegawai (Praoperasi) sebesar Rp139 Miliar, fasilitas depo & balai yasa sebesar Rp4,9M, jasa konsultan sebesar Rp44 Miliar dan IDC & Financing Fees sebesar Rp491 Miliar. Kemudian sisanya akan diproyeksikan ke Juni s.d. TW IV 2023. Lebih lanjut, empat dari lima temuan PMN pada PT KAI telah ditindaklanjuti dan sementara menunggu hasil validasi antara tim BPK RI dengan Inspektorat Kementerian BUMN.
4. Dari 10 temuan terkait PMN pada PT Wika, 8 diantaranya telah ditindaklanjuti dan telah diterima BPK RI, sementara 2 diantaranya telah ditindaklanjuti dan masih dalam proses validasi BPK RI.
5. Kontribusi setoran pajak PT HK kepada penerimaan negara mengalami peningkatan sejak tahun 2018 – 2021. Kemudian menurun di tahun 2022. Sedangkan, dividen kepada penerimaan negara,

mengalami peningkatan tahun 2018-2019. Dan dikarenakan kinerja keuangan PT HK pada tahun 2020 – 2022 mengalami kerugian, maka tidak ada dividen yang dibagikan ke negara. Lebih lanjut, Dari 4 temuan PMN pada PT HK, semuanya telah ditindaklanjuti dengan status telah sesuai rekomendasi..

IV. PENUTUP

Dari kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI dapat memperoleh secara langsung penjelasan, masukan dan pandangan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN RI, PT KAI, PT Wijaya Kara, dan PT Hutama Karya. Pertemuan itu juga menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan, khususnya terkait dengan fungsi pengawasan keuangan Negara, atas kebijakan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN dan Badan Lainnya.
